

# ISU AKTUAL ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:

Desi Fernanda, Drs. MSocSc

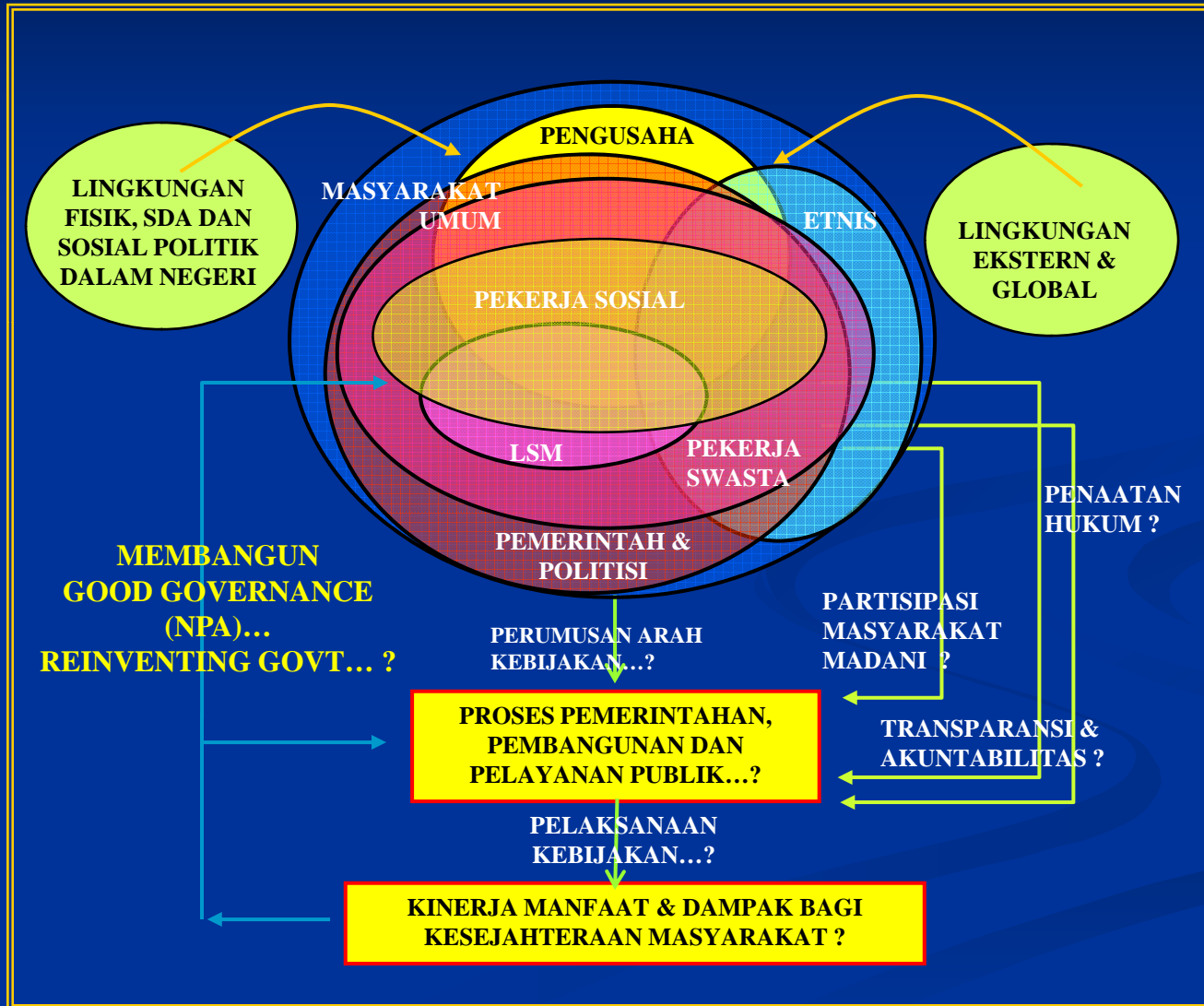


FENOMENA 'PENYELENGGARAAN NEGARA' ATAU "ORGANISASI DAN MANAJEMEN" NEGARA YANG BERKENAAN DENGAN KESELURUHAN UNSUR DAN INTERAKSI ANTAR UNSUR NEGARA (WARGA NEGARA, WILAYAH NEGARA, PEMERINTAHAN NEGARA), TUJUAN BERNEGARA, POSISI DAN PERAN NEGARA DAN WARGA NEGARA (MASYARAKAT) DALAM KESELURUHAN AKTIFITAS DI DALAMNYA.

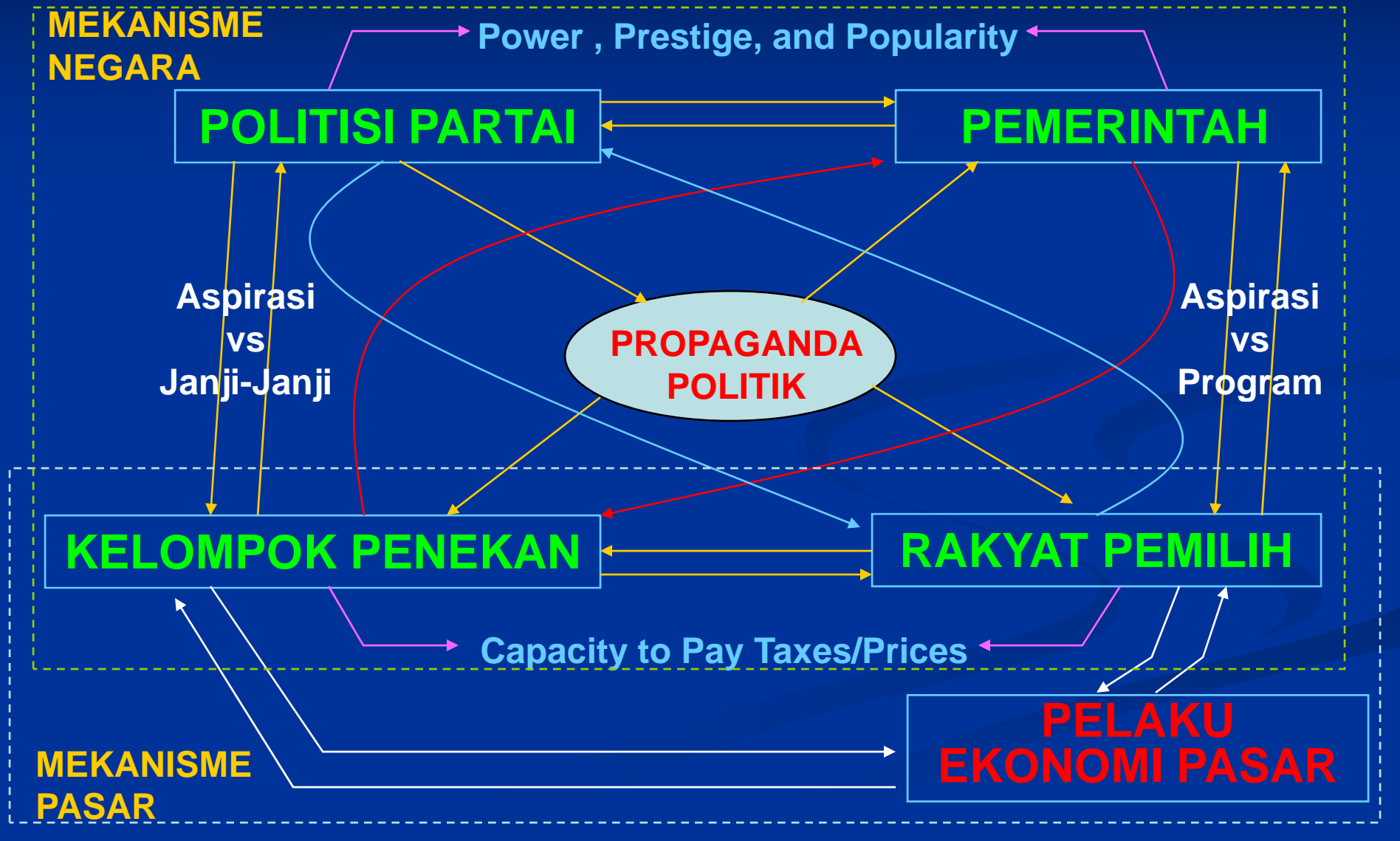
**FOKUS KAJIAN**

# Interaksi Sosial Politik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kepemerintahan Yang Baik

(Paradigma New Public Administration)

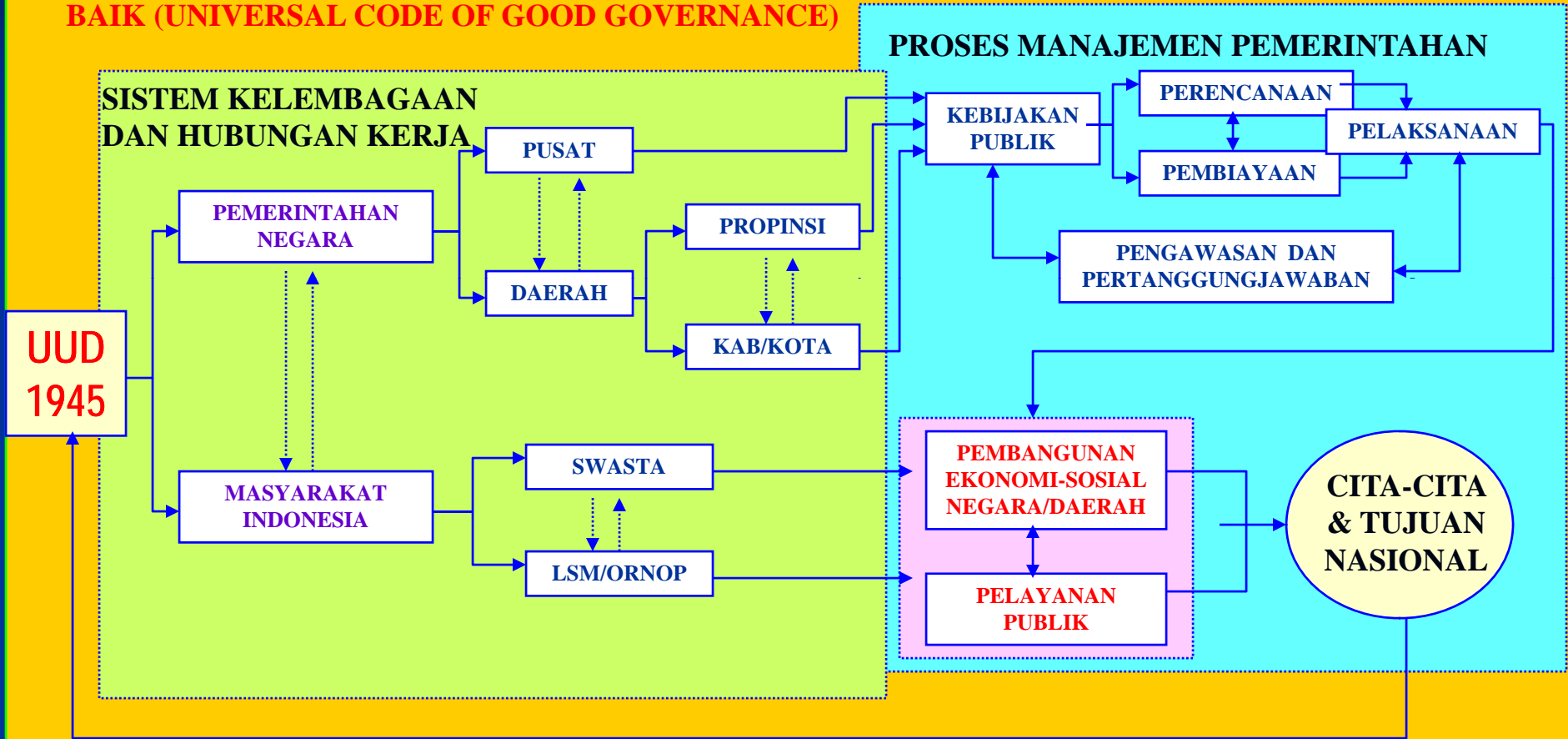


# KERANGKA HUBUNGAN ANTAR PELAKU DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA



# SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (UNIVERSAL CODE OF GOOD GOVERNANCE)



= Hubungan Koordinasi, Kerjasama/  
Co- arrangement

**ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA (UU 28 / 1999) (NATIONAL CODE OF GOOD GOVERNANCE)**

# KERANGKA STRATEGIS PERMASALAHAN ADMINISTRASI NEGARA



# PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER

- Berorientasi interaktif dan eksternal;
- Bersifat Holistik dan Komprehensif dalam tindakan dan kebijakan pemecahan permasalahan publik;
- Mendelegasikan tanggung jawab makro terhadap berbagai unsur pelaku sosial, dan memberdayakan mereka untuk mengambil dan menerima tanggung jawab tersebut;
- Memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam kerangka sosial-politik

## Dilandasi oleh:

- Mutual trust & understanding
- Shared Responsibility
- Political Support & Participation
- Empowerment
- Partnership & Co-arrangement

# MASALAH KEKUASAAN ADMINISTRATIF

## Pada Tingkat hirarkhi jabatan yang lebih tinggi:

- penyalahgunaan kekuasaan
- perilaku korup para pejabat, dan /atau
- tindakan menghambat negara atau pemerintah
- tidak mengambil tindakan tertentu ketika seharusnya mengambil tindakan

## Pada tingkat menengah dan rendah:

- korupsi individual,
- perilaku korup berlaku umum dalam upaya mencapai tujuan tertentu (misalnya perilaku suap dalam proses tender ataupun pelayanan umum lainnya; SPPD fiktif, mark-up harga-harga, dsb).



## AKUNTABILITAS EKSTERNAL

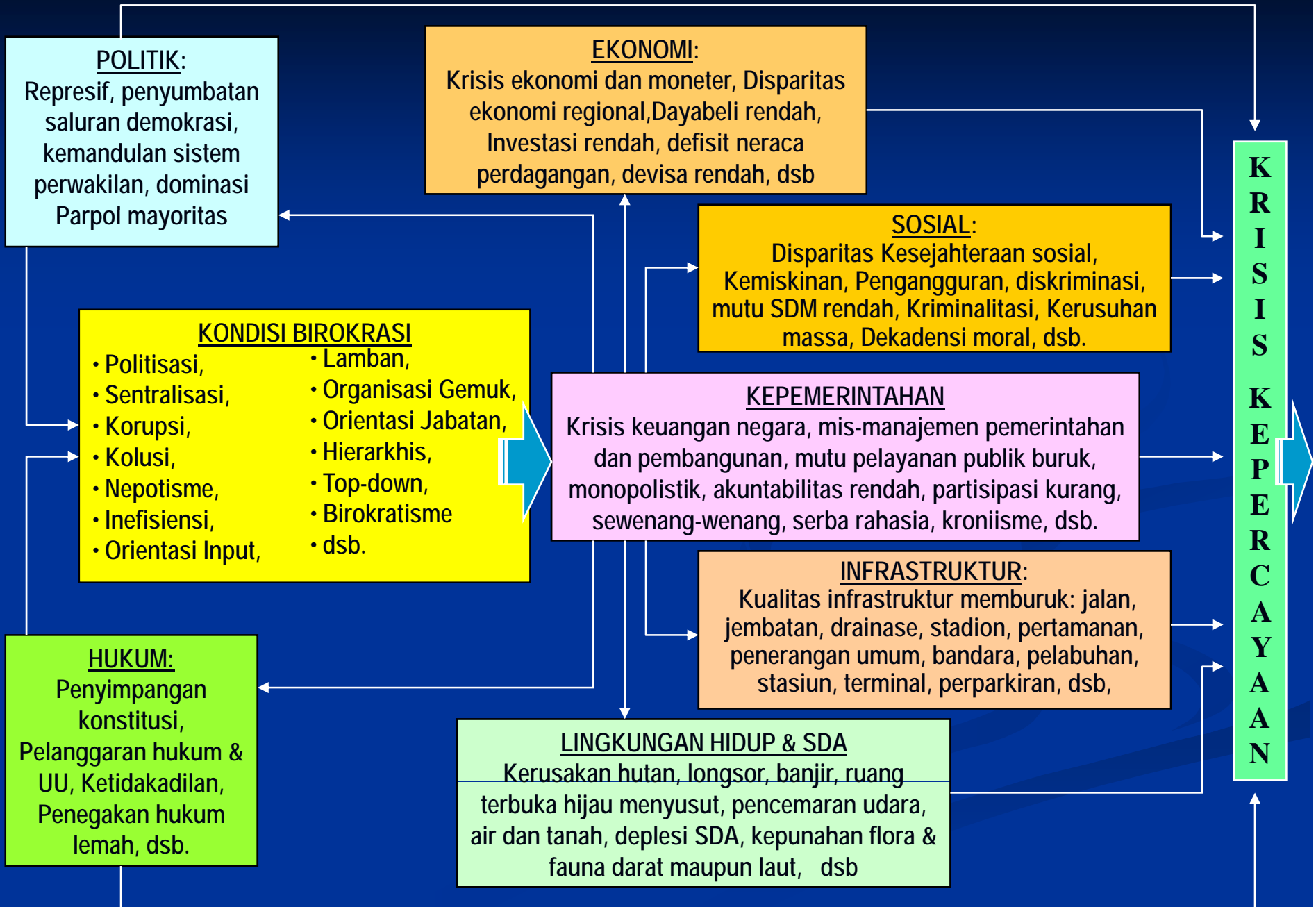
- Akuntabilitas eksternal dapat juga diartikan sebagai pertanggungjawaban seorang pejabat atau aparatur pemerintah atau sesuatu organisasi pemerintah kepada pihak ekstern atau masyarakat atas kinerja pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan tertentu yang telah dilakukan; mencakup:
  - Seberapa baik kinerja pencapaian hasil dibandingkan dengan target ataupun sasaran tugas yang ditetapkan ?
  - Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber ?
  - Apakah kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dan sejalan dengan mandat atau tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
  - Apakah masyarakat puas dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan ?

# JENIS-JENIS AKUNTABILITAS

- **AKUNTABILITAS FISKAL**: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN ATAU PEMANFAATAN DANA PUBLIK
- **AKUNTABILITAS HUKUM/LEGAL**: PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK PENAATAN ATAS ATURAN-ATURAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- **AKUNTABILITAS PROGRAM**: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN SESUATU PROGRAM KEGIATAN TERTENTU
- **AKUNTABILITAS PROSES**: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ATURAN TATA KERJA ATAU PROSEDUR KERJA
- **AKUNTABILITAS KINERJA**: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HASIL-HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN/TUGAS YANG DIBEBANKAN

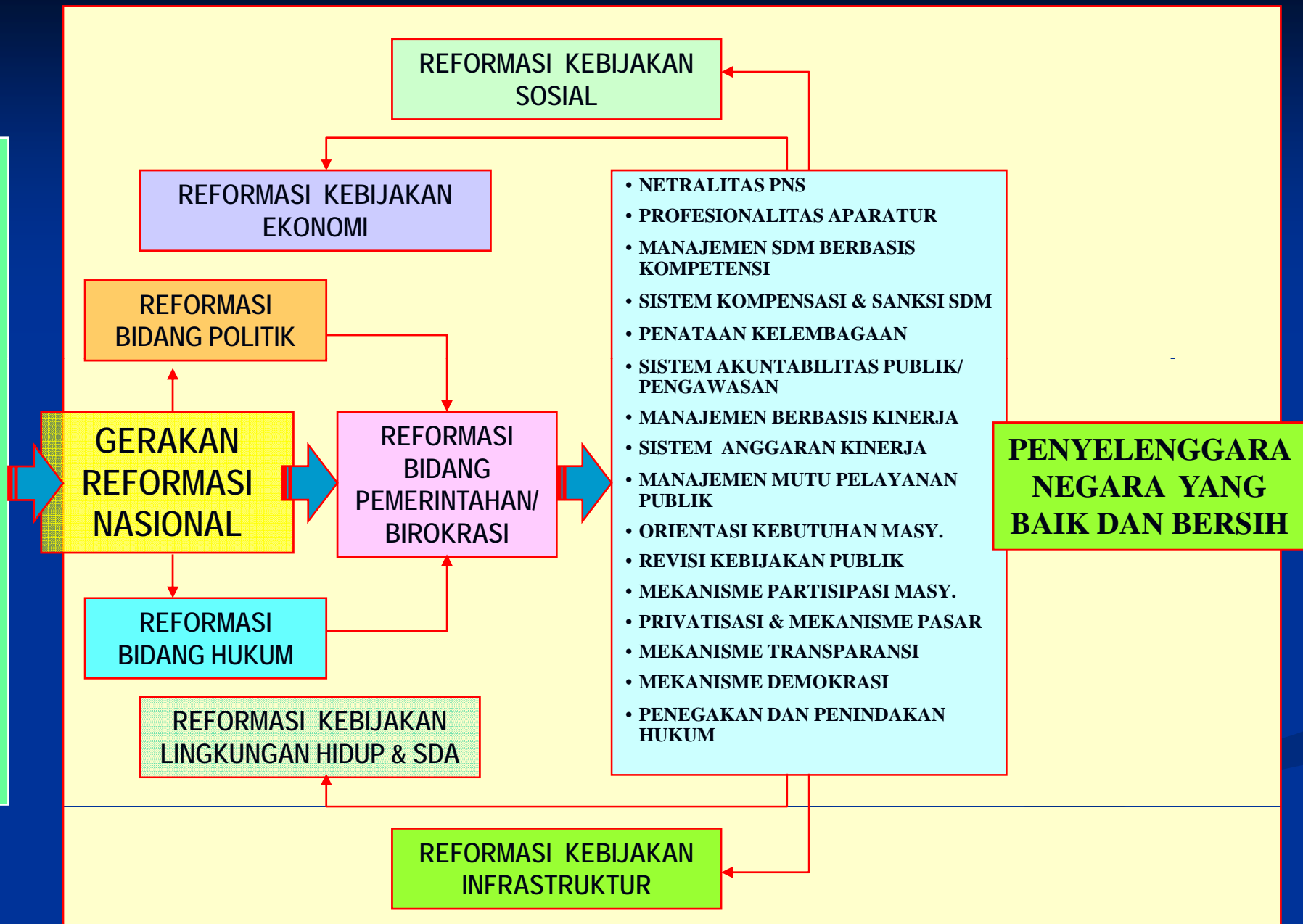
(McKinney dan Howard, 1979: 417)

# FAKTOR-FAKTOR PENDORONG REFORMASI BIROKRASI



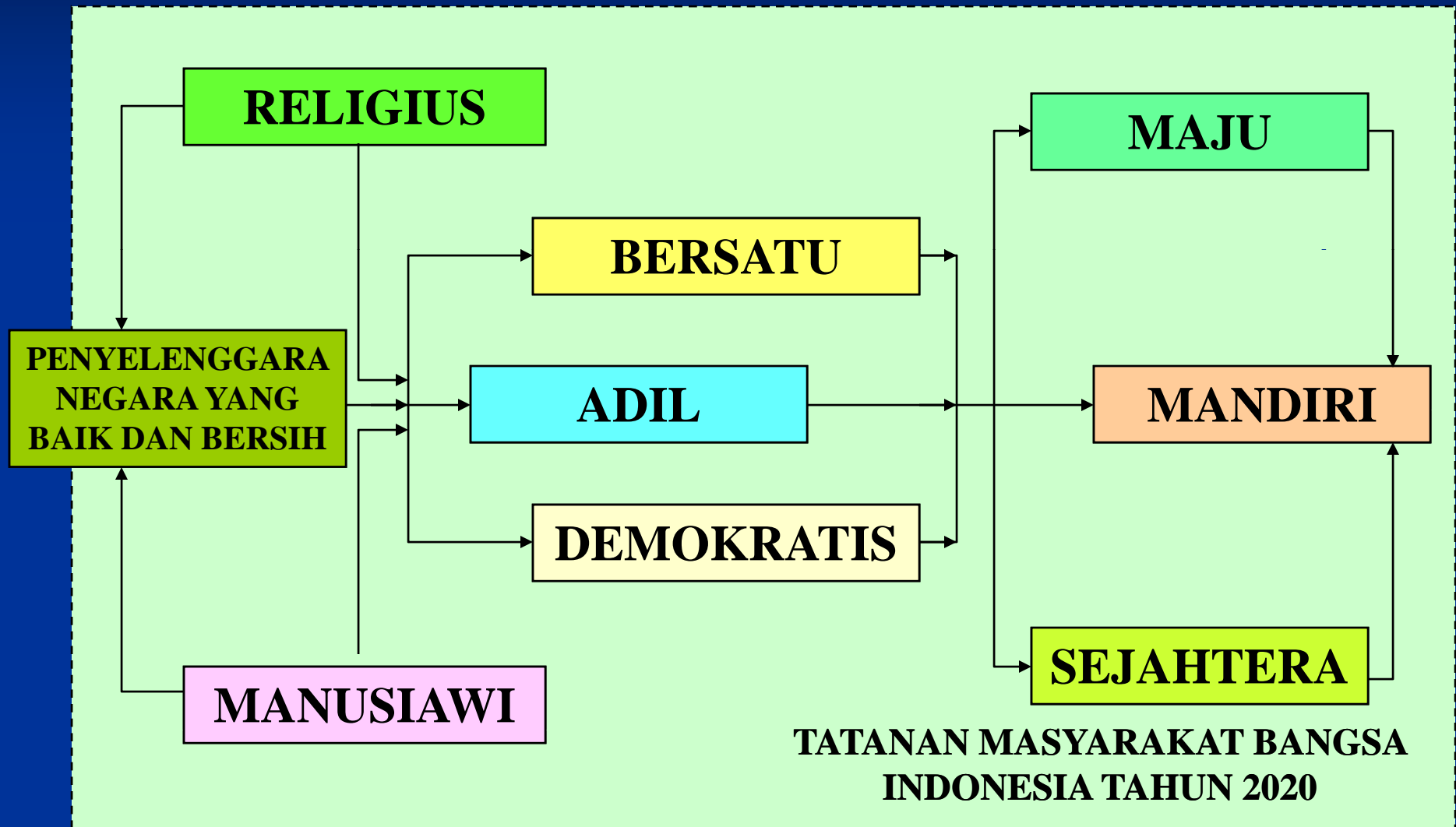
# ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

K  
R  
I  
S  
I  
S  
K  
E  
P  
E  
R  
C  
A  
Y  
A  
A  
N



# VISI INDONESIA 2020

(Tap MPR No. VII/MPR/2001)



## Enabling environment

### Institutional context

- Policies and regulations
- Structures
- Role of State institutions
- Human resources capacity
- Incentives and salary
- Accountability/openess

### Sociopolitical context

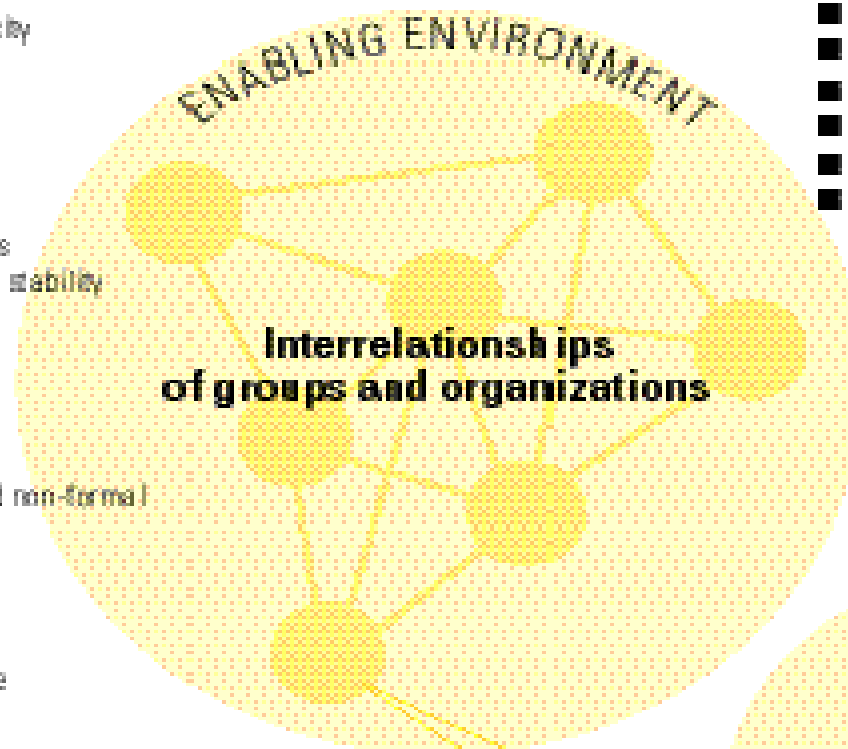
- Role of civil society
- Social structures, values
- Sources for conflict and stability
- Equity power relations
- Gender role
- Political commitment

### Economical context

- Markets and formal and non-formal private sector
- Macro-fra network
- Regulatory framework
- Global linkages
- Development assistance

### Environmental context

- Natural resource management
- Energy and water
- Environmental sustainability
- Biodiversity



## Individual learning

### Key requirements

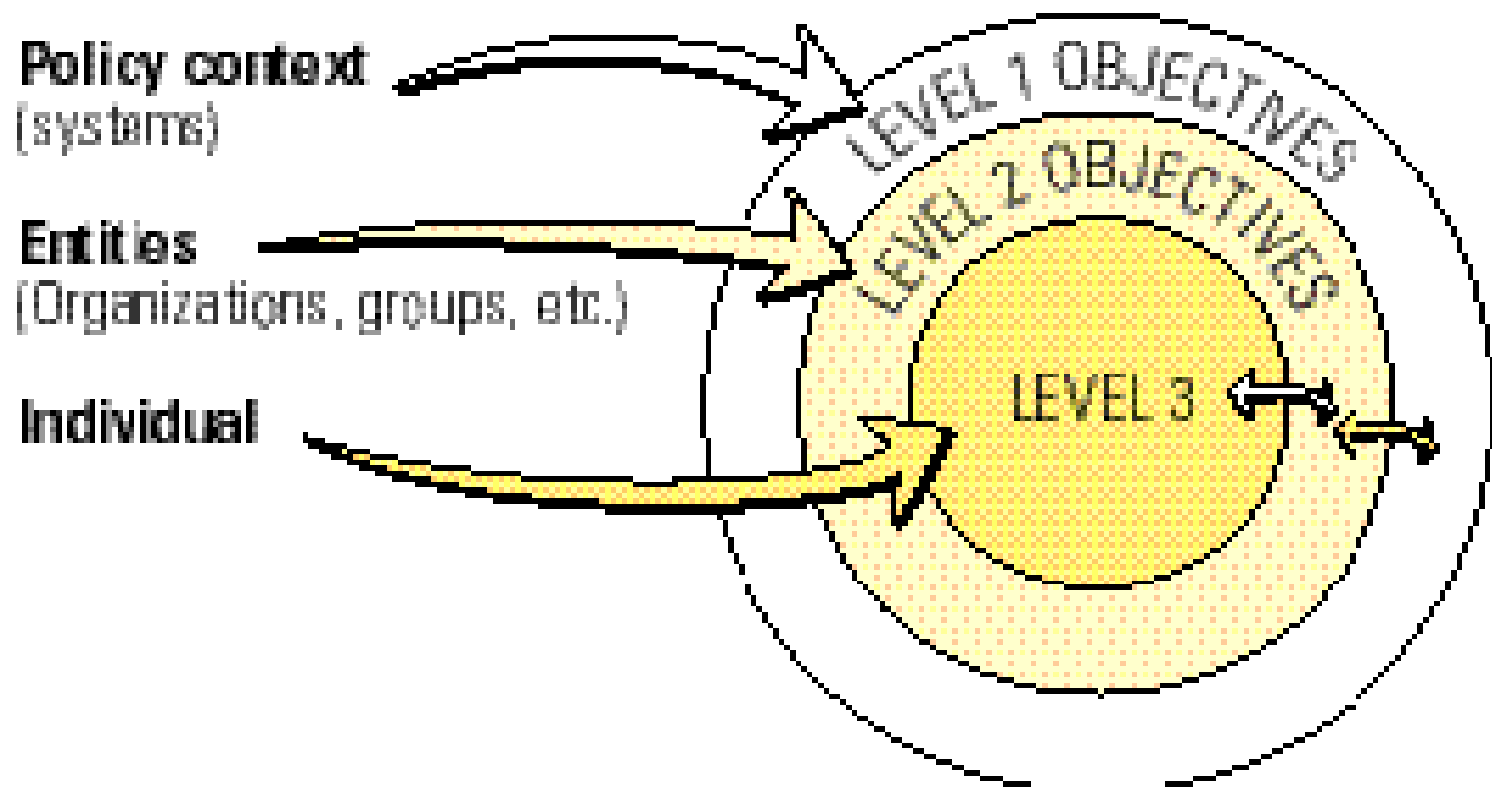
- Participation in decisions and implementation of learning processes
- Clear understanding of roles
- Access to information
- On-the-job training
- Formal/informal training
- Adequate incentives and wages
- Accountability and feedback

## Organization

- Mission
- Vision
- Strategy
- Policies & values
- Competencies & structure
- Processes and systems
- Human resources
- Physical resources
- Financial resources

<http://mirror.undp.org/magnet/Docs/cap/Capdeven.pdf>

## Hierarchies of objectives for capacity assessment



# Capacity Development Strategy

1. Strategic thinking
2. Beneficiary or customer-orientation
3. Delegation
4. Duplication
5. Partnerships
6. Structures
7. Cost-effectiveness
8. Results-oriented
9. Use of existing capacities
10. Transparency and accountability
11. Human resources
12. Continuous learning



# Policy & Program Approach

1. Advocates for people-centred approaches to help define clear goals, policies and strategies.
2. Strategically develops key capacities to attain high-impact national goals for sustainable human development.
3. Provides critically required development services ... to ensure that resources are not spread thin and are focused on achieving priority ... goals.

**POLICY – CAPACITY DEVELOPMENT – COORDINATION  
APPROACH**